

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penulisan tesis ini yakni:

1. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya skema *parate executie* terhadap objek Hak Tanggungan sebagai bentuk pelunasan utang debitor wanprestasi oleh PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yakni, pertama sebagai bentuk upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah; kedua, skema *parate executie* dinilai lebih cepat proses penyelesaiannya; ketiga, biaya *parate executie* lebih murah dibanding dengan viat pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan perintah UUHT khususnya Pasal 6 jo Pasal 20, dimana ketentuan ini memberi kewenangan pada bank dengan kekuasaan sendiri memintakan lelang terhadap objek Hak Tanggungan yang dijaminan nasabah atas perjanjian kredit. Perjanjian ini selanjutnya diikuti dengan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Kebijakan Bank Syariah Bukopin Bukittinggi, dalam perjanjian kredit juga diikuti dengan Akta Pengakuan Hutang. Skema tersebut diatur dalam aturan internal yakni Surat Keputusan Direktur Nomor: 044/SKEP-DIR/KP-JKT/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pembiayaan khususnya Bab VI dan

Memorandum Nomor 267/DIR/KP-JKT/XI/2016 tertanggal 30 November 2016 tentang Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah.

2. Pelaksanaan *parate executie*, dilakukan Bank Syariah Cabang Bukittinggi berdasarkan peraturan internal perusahaan di atas yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang melalui tahapan pra lelang, lelang, dan pasca lelang. Sesuai dengan SKEP DIR 044, bank melakukan upaya *parate executie* pada pembiayaan dengan kolektabilitas mulai dari 4 (diragukan) dan 5 (macet) meski dalam pelaksanaannya baru dilaksanakan pada nasabah dengan pembiayaan berada pada kolektabilitas macet. Pada tahapan lelang *parate executie* dilakukan dengan tahapan pra lelang, lelang, dan pasca lelang. Pada tahap pra lelang, bank menyurati nasabah sebanyak tiga kali dalam bentuk Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III; mengupayakan opsi penjualan sendiri oleh nasabah dengan tenggat waktu tertentu. Jika hal tersebut tidak membuahkan hasil, bank mengajukan permohonan lelang ke KPKNL sebagai upaya untuk menyelamatkan bank dari kerugian dari pembiayaan bermasalah. Pada tahapan selanjutnya, lelang dilakukan sebanyak tiga kali dengan skema penurunan nilai limit. Jika objek lelang tidak terjual, pada tahapan pasca lelang, maka diajukan penghapusbukuan (*write off*) dengan catatan nasabah tetap tidak kehilangan kewajiban untuk membayar angsuran dalam jangka waktu tidak ditentukan lamanya. Sebaliknya, jika lelang HT terjual, maka kelebihan dana

dikembalikan setelah kewajibannya dilunasi. Dalam hal tidak ada kelebihan dana dari penjualan objek HT, maka nasabah tidak menerima apa pun dari lelang objek HT.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dalam penulisan ini yakni:

1. Akta Pengakuan Hutang yang diterapkan pihak bank untuk menambah keyakinan pemberian kredit tidak semestinya dilakukan karena isinya bertentangan dengan perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, jumlah hutang tidak pasti karena dikenakan bunga, provisi, dan lain-lain. Sementara dalam Akta Pengakuan Hutang, jumlah hutang harus pasti, tanpa mengandung bunga, janji-janji, dan lain-lain. Akta pengakuan hutang yakni pernyataan sepihak sedangkan perjanjian kredit merupakan kesepakatan para pihak yakni kreditor dan debitor sehingga tidak tepat jika bank dalam menyalurkan kredit dengan agunan HT membuat akta pengakuan hutang dalam proses pencairan kredit. Dan hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 12 UUHT di mana janji-janji untuk memiliki objek HT pada saat debitor cidera janji, batal demi hukum.
2. Parate executie objek HT mestinya menjadi pilihan kedua bagi kreditor untuk memperoleh pelunasan utang dari debitor yang cidera janji dan mengutamakan penjualan di bawah tangan dengan catatan harga lebih tinggi jika dibandingkan dengan lelang di KPKNL dan tentunya menguntungkan semua pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2)

UUHT terkait penjualan di bawah tangan terhadap objek HT atas pembiayaan bermasalah dengan catatan mendapatkan harga tertinggi.

